

PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

(Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)

ANY ISMAYAWATI

Jurusan Syari'ah STAIN Kudus, Jl. Conge Ngembalrejo, Kudus, Jawa Tengah

Abstract

The developmental of legal culture of Indonesia experienced a shift away from nature, personality and identity of the Indonesian nation. Legal cultural development of Indonesia at this time was very down. Shifting of the Indonesian legal culture is influenced by internal and external factors. Internal factors related to the morals understanding of Indonesia, while the external factors associated with the development of technologies and ideas or thoughts from a foreign culture. The condition of the legal culture is one factor that resulted in his chaos of law in Indonesia because the legal culture is one of the most influential law component, both in the establishment of law and in law enforcement. The establishment of law and law enforcement is a form of legal development, it can be said with the collapsed culture of law it will have a negative impact on the development of the law.

Keyword: Legal, Culture, Development

I. PENDAHULUAN

Berbicara tentang pembangunan hukum sudah pasti tidak dapat dilepaskan dari politik hukum, Moh. Mahfud MD (2008:31) mengatakan jika hukum diartikan sebagai alat untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa atau dengan kata lain politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita dan tujuan.

Menurut T.M. Radhie dalam (Moh. Mahfud MD, 2008:31) mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah pembangunan hukum yang dibangun. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa politik hukum mencakup hukum yang berlaku pada saat ini dan hukum yang dicita-citakan.

Pandangan Moh. Mahfud MD (2009:17) bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Sedangkan pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembangunan yang berkelanjutan” (*sustainable reform/ sustainable development*).

Menurut Barda Nawawi Arief (1994:15) bahwa di dalam pembangunan hukum selalu terkait dengan perkembangan/ pembangunan masyarakat yang berkelanjutan maupun “perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/ aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ ide-ide dasar/ konsepsi intelektual”. Jadi “*law reform*” terkait erat dengan “*sustainable society/ development*”, “*sustainable intellectual activity*”, “*sustainable intellectual phylosophy*”, “*sustainable intellectual conceptions/ basic ideas*”. Kajian terhadap masalah ini tentunya

merupakan kajian yang “bergenerasi”, hal ini berarti masalah pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang harus terus-menerus dikaji.

Pada dasarnya pembangunan hukum meliputi pembangunan substansi hukum, pembangunan struktur hukum dan pembangunan kultur hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa komponen-komponen yang terkandung dalam hukum meliputi : komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, komponen substansi yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan lain-lain yang dipergunakan oleh penegak hukum dan oleh mereka yang diatur, serta komponen hukum yang bersifat kultural yang terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum (Esmi Warassih Pujirahayu, 2005: 81-82).

Sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi ini ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu.

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan (Hilman Hadikusuma, 1986:11).

Budaya hukum yang baik, akan membuat anggota masyarakat pendukungnya mampu berekspresi secara baik, positif dan kreatif

Budaya hukum yang baik, akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat tergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan (Esmi Warassih Pujirahayu, 2005: 96).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kultur suatu bangsa sangat berpengaruh terhadap kondisi hukum bangsa tersebut. Oleh karena itu, pembaharuan hukum suatu bangsa sangat dipengaruhi perkembangan masyarakatnya, termasuk di dalamnya pengaruh dari nilai-nilai sosial budaya yang merupakan jiwa suatu bangsa (*volkgeist*). Demikian pula yang dikatakan oleh Esmi Warassih Pujirahayu (2005: 96), dalam membicarakan tentang hukum kita tidak dapat lepas dari faktor-faktor non hukum lainnya terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang semua itu disebut kultur hukum. Jadi pada dasarnya pembaharuan (pembangunan) hukum harus dimulai dari pembaharuan budaya atau kultur hukum, karena keberadaan kultur hukum sangat mempengaruhi substansi dan struktur hukum.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan hukum adalah bahwa budaya hukum Indonesia sedang berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Pembentukan budaya hukum tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan kultur dan karakteristik masyarakat. Budaya hukum yang tumbuh dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tatanan nilai yang merupakan dasar pijakan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil akhir dari

pembangunan hukum, untuk itu diperlukan suatu langkah-langkah agar perubahan budaya hukum justru dapat meningkatkan pembangunan hukum dengan hasil yang dapat membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Dengan memahami apa yang dimaksud dengan pembangunan hukum, dan apa pula yang dimaksud dengan budaya hukum, diharapkan akan dapat diketahui sejauh mana peranan budaya hukum dalam pembangunan hukum. Untuk lebih jelas memahami dan mencermati hal tersebut, maka dalam penulisan makalah ini memunculkan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana perkembangan budaya hukum bangsa Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh budaya hukum terhadap pembangunan hukum di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

Perkembangan Budaya Hukum Bangsa Indonesia

Budaya hukum menurut Satjipto Rahardjo (1983:12) adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Lawrence M. Friedman menggunakan istilah kultur hukum untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang saling berkaitan. Budaya hukum/ kultur hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Lawrence M. Friedman (1975:15) adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum. Dengan demikian keberadaan budaya hukum menjadi sangat strategis dalam menentukan pilihan untuk berperilaku dalam menerima hukum atau menolak hukum. Dengan perkataan lain, suatu hukum akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan dipatuhi oleh masyarakat adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat bersangkutan.

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman tersebut maka budaya hukum dapat diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat sejauh mana suatu masyarakat bisa menerima keberadaan suatu sistem hukum.

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Adapun Daniel S. Lev (1980: 192) membedakan budaya hukum dalam dua macam. *Pertama*, "*Internal Legal Culture*", yaitu budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, misalnya pengacara, polisi, jaksa dan hakim ; dan *Kedua*, "*External Legal Culture*", yaitu budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/ masyarakat luas. Daniel S. Lev (1980:192-193) melihat bahwa untuk memahami budaya hukum, ada cara praktis yang dapat dilakukan dengan memperhatikan dari 2 (dua) indikator, yaitu (1) nilai-nilai yang berhubungan dengan sarana pengaturan sosial dan penanganan konflik. Nilai-nilai ini adalah dasar kultur dari sistem hukum dan sangat membantu dalam menentukan "sistem pemberian tempat" kepada lembaga-lembaga hukum, politik, religi dan lain-lainnya pada setiap tempat dan waktu dalam sejarah suatu masyarakat ; (2) asumsi-asumsi dasar mengenai penyebaran dan penggunaan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kebaikan dan keburukan sosial dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi tersebut, lanjut Daniel S. Lev, terdapat dalam pandangan ideologi mengenai ekonomi, politik dan sosial yang berubah-ubah serta berbanding lurus dengan perubahan masyarakat, dengan kemungkinan secara kultur bersifat khusus atau justru sebaliknya.

Dapat dikatakan bahwa budaya hukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan keberadaan sistem hukum untuk memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum yang tumbuh dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tatanan nilai yang merupakan dasar pijakan dalam berbangsa dan bernegara.

Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat (Hilman Hadikusuma, 1986:16).

Berdasarkan beberapa pengertian tentang budaya hukum maka dapat kita simpulkan bahwa budaya hukum Indonesia sedang berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Permasalahan yang krusial sekarang ini adalah timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Budaya hukum bangsa Indonesia banyak mendapatkan pengaruh dari aliran-aliran hukum maupun sistem hukum bangsa barat (Belanda), yang merupakan asal hukum positif bangsa Indonesia.

Banyak perilaku kehidupan bangsa Indonesia yang dapat menggambarkan hal tersebut, contoh yang sangat mudah dilihat adalah perubahan perilaku dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Dahulu bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persengketaan atau selisih paham diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dengan cara damai, tetapi perkembangan sekarang setiap muncul perselisihan lebih banyak diselesaikan di pengadilan, meskipun semua orang tahu bahwa sekarang ini pengadilan bukan tempat untuk mencari keadilan.

Di sisi lain banyaknya perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat yang tidak terselesaikan. Hal ini bukan berarti belum adanya aturan, undang-undang, dan lemahnya struktur hukum, tetapi lebih disebabkan masih lemahnya budaya hukum, yang dalam hal ini adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia kian hari tidak menjadi lebih baik tetapi menjadi semakin menurun.

Hal tersebut dikarenakan budaya hukum bangsa Indonesia telah bergeser ke pandangan yang materialistik. Bergesernya pandangan tersebut salah satunya dipicu karena tidak efektifnya hukum. Ketidakefektifan hukum ini dikarenakan banyak produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dalam mematuhi hukum bukan karena kesadaran akan arti penting hukum tetapi lebih karena takut pada petugas/penegak hukum. Kondisi ini membentuk suatu pemikiran pada masyarakat yang menganggap hukum adalah petugas, sehingga jika tidak ada petugas dianggap tidak ada hukum.

Kalau ditelisik pada perilaku bangsa Indonesia di masa lalu, ketaatan masyarakat pada suatu aturan bukan karena takut pada aparat tetapi mereka menyadari akan arti penting dan tujuan dari aturan yang ada. Hal ini dapat kita lihat pada daerah-daerah swapraja yang mempunyai aturan-aturan yang bersifat lokal (kearifan lokal).

Masyarakat setempat akan mematuhi aturan tersebut dengan kesadaran yang tinggi bahwa aturan tersebut bertujuan untuk kebaikan tanpa harus ada petugas yang selalu mengawasi dan mengatur pelaksanaan peraturan tersebut. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya.

Saat ini bangsa Indonesia dalam ber hukum juga dipengaruhi pandangan positivis. Baik aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam melaksanakan dan mematuhi peraturan mengharuskan diri berpedoman pada aturan yang secara formal ada sebagai undang-undang. Khususnya para aparat penegak hukum dalam mengartikan hukum adalah undang-undang, jadi dalam bekerja para aparat hukum ini sangat kaku karena berpandangan legalistik.

Keberadaan hukum yang hidup tidak dipedulikan bahkan hukum yang hidup cenderung "ditiadakan". Kondisi seperti ini merupakan pergeseran budaya hukum yang sangat tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan pandangan positivis/ legalistik pemikiran dan tenaga kita lebih banyak difokuskan untuk membuat aturan dan undang-undang baru tanpa memberi ruang yang memadai bagi perbaikan dan penyiapan kultur hukum (sebagai struktur) yang lebih kuat dan baik.

Pandangan individualistik merubah secara signifikan perkembangan budaya hukum bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang bersifat komunal menjadi sangat individual termasuk dalam perilaku hukumnya. Masyarakat sekarang ini cenderung memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya, bahkan masyarakat cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya bersifat tidak adil bagi masyarakat lainnya.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa salah satu unsur yang cukup penting

dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Ketika berbicara unsur manusia dari aspek *kesadaran hukum* masyarakatnya, maka di sini berarti menyoroti segi manusia sebagai individu yang membentuk budaya hukumnya.

Seseorang akan taat pada hukum atau tidak, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang paling berpengaruh terhadap ketaatan seseorang adalah budaya hukumnya. Budaya hukum dilingkungan orang bekerja di kantor akan berbeda dengan budaya hukum orang yang bekerja di jalanan, atau dapat dikatakan bahwa budaya hukum orang dari status sosial bawah akan berbeda dengan budaya hukum dari orang yang status sosialnya dari lapisan atas. Kesadaran hukum (budaya hukum) masyarakat kita lemah, maka katalis (undang-undang, aturan, dan struktur hukum) apa pun yang diberlakukan dalam sistem sosial, hasilnya tidak efektif. Mengingat kesadaran kolektif (budaya hukum) ini terbentuk dari interaksi antar komponen masyarakat, maka jika kesadaran hukum masyarakat lemah, berarti kualitas interaksi dalam masyarakat yang belum bermakna (<http://antikorupsi.org/indo/content/view/5197/2/>, diakses 10 Mei 2010 pukul 09.00).

Peranan Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, sebagai satu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Aktor tersebut yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya. Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya yang memerlukan penyerasian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang

dimimpikan akan tercipta pada masa depan (Rabi'atul Syariah, Jurnal Equality Vol. 13 No.1 Februari 2008:35).

Sasaran pokok pembangunan peraturan perundang-undangan meliputi: *Pertama*, melanjutkan pembaharuan peraturan perundang-undangan dari masa kolonial. *Kedua*, Memperbaharui peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah merdeka telah ketinggalan atau tidak mencerminkan dasar dan arah politik hukum menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, berdasarkan atas hukum, berkeadilan sosial dan satu pemerintahan yang bersih. *Ketiga*, menciptakan peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan baik dalam rangka memperkuat dasar dan arah politik hukum maupun mengisi berbagai kekosongan hukum akibat perkembangan baru. *Keempat*, mengadakan atau memasuki berbagai persetujuan internasional baik dalam rangka ikut memperkokoh tatanan internasional maupun untuk kepentingan nasional (Bagir Manan, 1999).

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam Bahan Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2009, bahwa masalah besar dalam Pembangunan Hukum Nasional meliputi *law enforcement* dan *law reform/development* dan *law making*. Pembangunan Nasional tidak hanya meliputi pembuatan hukum saja tetapi juga penegakan hukum, dan keduanya sama-sama merupakan suatu permasalahan yang memerlukan penanganan dalam pembangunan hukum nasional. Hanya saja kalau kita berbicara tentang *law reform/development* dan *law making* berarti kita berbicara tentang masalah *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan. Sedangkan kalau kita berbicara pada *law enforcement* maka akan membicarakan tentang *ius constitutum* atau hukum yang sedang berlaku saat ini. Membicarakan hukum yang berlaku saat ini sudah barang pasti akan mengkaji tentang penegakan hukum *in-concreto*.

Dalam penulisan makalah ini lebih menyoroti pada pengaruh budaya hukum terhadap pembangunan hukum dibidang *law enforcement* atau penegakan hukum *in-concreto*. Dikatakan pula oleh Barda Nawawi Arief dalam (Bahan Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2009) bahwa dalam pembangunan hukum dimulai dengan pembangunan budaya hukum. Hal tersebut dikarenakan budaya hukum nasional merupakan nilai-nilai filosofis kultural yang fundamental bagi suatu bangsa, sedangkan pembangunan hukum pada hakikatnya adalah pembaharuan nilai/ide dasarnya.

Dalam praktek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan (Solly Lubis, 2000).

Sebelum tahun 1998, pemerintah tidak pernah memasukkan budaya hukum dalam agenda pembangunan, akan tetapi pada tahun 1998 dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dimensi "budaya" dimasukkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai sub sistem dari pembangunan hukum dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara sesuai dengan nilai dan norma Pancasila agar budaya hukum lebih dihayati dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesadaran, ketaatan serta kepatuhan hukum makin meningkat dan hak asasi manusia makin dihormati dan dijunjung tinggi.

2. Kesadaran untuk semakin menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan pada pencerahan harkat dan martabat manusia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketentraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional.
3. Kesadaran hukum penyelenggaraan negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati suatu bangsa yang *berbudaya hukum*.

Arti penting keberadaan budaya hukum dalam penegakan hukum (*Law enforcement*) dikemukakan oleh Soekarno Soekanto. Dalam pandangan Soerjono Soekanto (1983:3) bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait yaitu :

1. Hukum dan aturannya sendiri. Faktor ini diperlukan adanya peraturan perundangan yang dapat dilaksanakan dan keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada;
2. Sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan hukum (penegakan hukum). Faktor ini sering terabaikan sehingga hukum sulit untuk ditegakkan, karena sesungguhnya dalam penegakan hukum diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang;
3. Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Faktor ini merupakan wujud dari budaya hukum masyarakat yang bersangkutan (budaya hukum *external*), dan;
4. Mental aparat penegak hukum. Faktor ini merupakan budaya hukum internal.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, juga sangat tergantung pada mentalitas aparat penegak hukum dan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing, yang keduanya merupakan budaya hukum.

Dalam hal penegakan hukum (Esmi Warassih Pujirahayu, 2005: 81-82) mengatakan bahwa titik perhatian dalam penegakan hukum harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum. Faktor-faktor non hukum, termasuk kultur hukum yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Selanjutnya dengan upaya penegakan hukum, diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman (1984:5) dimana hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga, penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga melalui pemberdayaan aparat dan fasilitas hukum. Juga, yang tak kalah penting adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Berdasarkan pengamatan Lawrence M. Friedman dalam "*The Republic of Choice: Law, Authority and Culture* (1990), dimana tegaknya hukum tergantung pada budaya hukum (*legal culture*) masyarakatnya, seperti berbagai gagasan, sikap dan harapan rakyat tentang hukum serta proses hukum.

Selanjutnya Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.

Sehingga ketika “*substansi*” hukum positif sudah baik dan benar, dalam arti *legitimite* dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, “*struktur hukumnya*” sudah memadai, maka terakhir adalah bagaimana “*budaya hukum penegak hukum*” yaitu aparat hukum yang akan menerapkan hukum positif tersebut. Karena dari budaya hukum aparat penegak hukum inilah nantinya diharapkan akan mengalir barisan-barisan kekuatan, tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan yang membungkus pranata-pranata hukum yang mengandung moral dan pada akhirnya menentukan bentuknya.

Pentingnya budaya hukum dalam konstruksi pranata hukum itu sejalan dengan ilustrasi Friedman, apabila “*sistem hukum*” diibaratkan untuk memproduksi suatu barang, maka kedudukan “*substansi hukum*” diibaratkan sebagai barang apa yang diproduksi, dan “*struktur hukum*” diibaratkan sebagai mesin-mesin pengelola barang. Sedangkan “*budaya hukum*” diibaratkan sebagai orang-orang yang menjalankan mesin dan berkewajiban untuk menghidupkan, menjalankan dan mematikan mesin ini, agar dapat menentukan baik buruknya hasil barang yang diproduksi (Bismar Nasution, makalah “*Peranan Birokrasi Dalam Mengupayakan Good Governance : Suatu Kajian Dari Pandangan Hukum dan Moral*”, disampaikan pada *Diseminasi Policy Paper* Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia “Reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-prinsip Good Governance”, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia berkerjasama dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tanggal 1-2 Oktober 2003, Medan, Sumatera Utara.).

Dalam tulisannya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut: “*Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal “structure” as a kind of machine. “Substance” is what the machine manufacturers or does. The “legal culture”*

is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used” (Lawrence M. Friedman, 1984:7).

Upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan mendasarkan kepada pembentukan budaya hukum atas dasar keadilan harus dikedepankan ditengah “*carut-marut*” hukum di negeri ini. Penegakan hukum sebagai upaya menegakan keadilan dapat pula menjadi sarana kritik atau koreksi atas hukum positif. Jika aspek keadilan merupakan landasan utama aturan hukum positif dan ukuran kelakuan manusia, maka upaya penegakan hukum dapat dilakukan dalam kerangka untuk mencapai keseimbangan hidup antara manusia, sehingga tercipta keadilan, kedamaian, ketertiban, dan kebaikan umum dalam masyarakat.

Dengan perkataan lain, kesadaran hukum masyarakat untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku akan membentuk *budaya hukum* yang tinggi pula, karena kepercayaan masyarakat pada hukum itu sendiri (*substansi*) dan aparat hukumnya (*struktur*).

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman dapat dikatakan bahwa substansi, struktur dan budaya hukum adalah satu kesatuan dalam melakukan upaya penegakan hukum. Artinya sebaik apapun suatu perundang-undangan apabila tidak disertai dengan struktur pelaksana yang baik dan budaya yang mendukung maka akan sulit untuk melakukan penegakan hukum (Sinar Harapan, 15 April 2008).

Arti penting budaya hukum dalam penegakan hukum juga disampaikan oleh mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam upacara penganugerahan Doktor Honoris Causa kepada dirinya di Universitas Diponegoro (Undip) Tembalang, Semarang. Beliau mengatakan bahwa penegakan hukum oleh aparat penegak hukum belum menjadi jaminan berhasilnya penanggulangan kejahatan tanpa disertai budaya sikap dan perilaku. Substansi hukum dan struktur hukum masih harus ditunjang dengan budaya hukum.

budaya hukum menjadi komponen penting dalam penegakan hukum pidana dan bagian penting dari kebijakan kriminal, karena penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurutnya, salah satu bentuk pendekatan integral yang terkait erat dengan upaya penanggulangan korupsi adalah pendekatan edukatif dalam membangun budaya antikorupsi (<http://www.ungkap.com/hukrim/164-hendarman-supandji-penting-kembangkan-budaya-hukum.html>, *Sambutan Jaksa Agung Hendarman Supandji* diakses 10 Mei 2010).

Dari berbagai pendapat dan teori jelas menguraikan bahwa budaya hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Budaya hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan sebagaimana tujuan hukum yang sesungguhnya.

Membangun Budaya Hukum : Sebuah Solusi dalam Pembangunan Hukum Nasional

Dewasa ini masalah besar dalam ber hukum sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah “*carut marut*” perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia merupakan problem yang memerlukan penanganan yang serius. Permasalahan hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia. Perkembangan hukum dari suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan konteks sosialnya. Krisis hukum bangsa ini ada hubungan secara langsung dengan krisis sosial yang sedang terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa apabila terjadi perubahan dalam masyarakat maka bidang hukum termasuk yang paling terkena oleh perubahan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2009:8).

Esmi Warassih Pujirahayu, (2005: 83) mengatakan bahwa penggunaan hukum secara sadar untuk merubah dan memperbaiki keadaan dari krisis menjadi keadaan yang

lebih baik merupakan suatu konsepsi yang modern dalam melihat hukum dan fungsinya.

Pada sisi yang lain disadari bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Dalam hal ini kita melihat pentingnya sikap-sikap, pandangan-pandangan, persepsi, serta nilai-nilai sosial dalam menentukan bekerjanya hukum. Hal-hal tersebut bisa disebut sebagai budaya hukum. Dalam konteks penegakan hukum Indonesia yang benar dan adil, perlu dilihat beberapa aspek relevan yang terkait dengan budaya hukum yang ada. Budaya hukum dalam suatu masyarakat dapat menghambat dan di pihak lain dapat menjadi faktor pendorong efektifitas penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (1983:3) penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam penegakan hukum (*Law enforcement*) banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagaimana yang telah diuraikan di muka, yaitu hukum dan aturannya sendiri, sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan hukum, kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat, dan faktor aparat penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, juga sangat tergantung pada mentalitas aparat penegak hukum, kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing, yang keduanya merupakan budaya hukum. Budaya hukum yang merupakan penilaian, harapan, sikap keinginan dari masyarakat (termasuk di dalamnya aparat penegak hukum)

terhadap suatu hukum merupakan gambaran berlakunya hukum pada suatu bangsa. Di samping itu budaya hukum juga berperan dalam mewarnai hukum suatu bangsa karena keberadaan budaya hukum mempengaruhi substansi hukum dan struktur hukum. Untuk itu apabila menghendaki sistem hukum Indonesia menjadi baik maka budaya hukum harus diperbaiki terlebih dahulu, sudah barang tentu tanpa mengenyampingkan perbaikan substansi hukum dan struktur hukum dan untuk menjadikan budaya hukum menjadi baik, maka perlu dilakukan pembangunan budaya hukum.

Dalam pembangunan budaya hukum harus dilakukan dengan program-program yang mengacu pada sumber dasar hukum dan jiwa kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar falsafah bangsa Indonesia, seharusnya pembangunan hukum didasarkan pada Pancasila bukan pada nilai-nilai asing yang sebetulnya tidak sesuai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Hukum yang dapat ditegakkan adalah hukum yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa. Hukum yang ditaati adalah hukum yang sesuai dengan keinginan, harapan, perilaku dan nilai-nilai bangsa.

Pancasila merupakan nilai-nilai filosofis kultural yang fundamental, maka dapat ditegaskan bahwa strategi pembangunan Sistem Hukum Nasional seharusnya dimulai dari "pembangunan kultural" (budaya hukum nasional), karena nilai-nilai Pancasila inilah yang merupakan ruh/ jiwa/ nur/ nilai dasar/ ide dasar dari Sistem Hukum Nasional. Pembangunan/ pembaharuan Sistem Hukum Nasional pada hakikatnya berawal dari pembaharuan nilai/ ide-dasarnya. Pembangunan/ pembaharuan sistem hukum nasional berarti pembaharuan budaya/ wawasan/ nilai-nilai/ ide dasar/ konsep hukum yang meliputi pembaharuan substansi hukum, pembaharuan struktur hukum dan pembaharuan kultur/ budaya hukum. Pembaharuan kultur/ budaya hukum meliputi

antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum (Barda Nawawi Arief, 2008:2). Menurut Barda Nawawi Arief, (2008:2) disebutkan bahwa Pembaharuan "budaya hukum pidana", yang meliputi antara lain kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum). Jadi pada dasarnya pembaharuan hukum nasional dimulai dari pembaharuan budaya atau kultur hukum dan filsafat hukum (filsafat hukum Pancasila) dan pembaharuan ilmu hukum (ilmu hukum Pancasila).

Membangun budaya hukum menjadi hal yang sangat penting karena dengan budaya hukum yang baik akan menghasilkan sistem hukum yang baik, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa budaya hukum sangat berpengaruh pada keberadaan substansi hukum dan struktur hukum. Sebaik apapun substansi hukum apabila tidak didukung dengan budaya hukum masyarakat yang baik, maka substansi hukum tersebut hanya menjadi kumpulan tulisan-tulisan tentang kaidah yang tak bermakna.

Substansi hukum yang begitu sempurna sesuai aspirasi masyarakat apabila tidak ditegakkan oleh struktur hukum yang baik maka hukum tersebut hanya akan menjadi lembaran-lembaran kertas yang tak berguna. Struktur hukum dalam melakukan penegakan hukum apabila tidak mempunyai budaya hukum yang baik, maka akan munculah mafia peradilan-mafia peradilan maupun markus (mafia kasus) dalam setiap penyelesaian masalah hukum. Begitu pentingnya pembangunan budaya hukum dalam upaya menciptakan sistem hukum yang baik, maka pemerintah memprioritaskan pembangunan budaya hukum menjadi urutan yang pertama dalam pembangunan hukum nasional, sebagaimana yang tercantum dalam pembangunan hukum versi pemerintah yang diejawantahkan dalam Proopenas 1999-2004 (<http://dimasprasidi.wordpress.com/2009/04/24/>, *Membaca-arrah-reformasi-hukum-pasca-perubahan-kekuasaan-tahun-1998/2004*, diakses 19 April 2010).

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat yang hidup dan berlaku dalam sebuah masyarakat lokal Indonesia, serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi nasional dan daerah.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (HAM).
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Pengacara), termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dan seluruh aspek yang berkaitan erat dengan kehidupan.
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Menurut Barda Nawawi Arief (bahan Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Bung Hatta (UBH), Padang, 16 Mei 2009), bahwa pembangunan budaya hukum nasional terdiri dari 5 sektor :

1. Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional;
2. Pembinaan Kesadaran hukum & perilaku taat hukum;
3. Pengembangan/ pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum;
4. Pengembangan dan pembinaan profesi hukum;
5. Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum.

Lima sektor dari pembangunan budaya hukum nasional menurut Barda Nawawi Arief tersebut dewasa ini dalam kondisi titik nadir yang sangat mengkhawatir, oleh sebab itu pembangunan budaya hukum yang berdasarkan Pancasila harus benar-benar segera direalisasikan agar terwujud sistem hukum yang baik sehingga “*carut marut*” hukum di Indonesia dapat teratasi.

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budaya hukum, yaitu antara lain :

1. Dengan merubah model pendidikan hukum yang selama ini hanya mempelajari undang-undang saja.
2. Membuat hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup/ hukum yang hidup dalam masyarakat dan diyakini kebenarannya, sehingga tidak akan menimbulkan penolakan dari masyarakat terhadap berlakunya hukum tersebut.

3. Dengan memperbaiki cara pembangunan budaya hukum, yaitu dengan cara memulai membangun budaya hukum melalui dari keluarga.

Hal ini dilakukan dengan cara membentuk pola pikir dan karakter disiplin sehingga dapat diarahkan menjadi masyarakat yang cerdas hukum yaitu masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif, tahu hak dan kewajiban dalam hukum, tahu akan kebolehan dan larangan, teliti dan cermat mengambil langkah serta tindakan yang berkaitan dengan hukum.

Dengan memperbaiki pembangunan budaya hukum, masyarakat akan memiliki kemampuan menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum adalah salah satu wujud kecerdasan hukum masyarakat. Pemerintah mengharapkan dan menggugah masyarakat Indonesia untuk bisa berperan aktif dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum <http://www.bphntv.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=65>, *Wawancara BHNTV dengan Menkumham tentang Pembangunan Budaya Hukum*, Senin 10 Agustus 2009, diakses pada tanggal 19 April 2010 pukul 21.00.

4. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, karena dengan penyuluhan hukum akan meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga yang taat pada hukum.
5. Meningkatkan keteladanan perilaku aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, dan juga meningkatkan ketaatan aparat penegak hukum terhadap hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi moralitas.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan budaya hukum bangsa Indonesia mengalami pergeseran yang jauh dari sifat, kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Bahkan kalau boleh dikatakan perkembangan budaya hukum bangsa Indonesia pada saat ini sudah sangat terpuruk. Bergesernya budaya hukum bangsa Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan moral maupun pemahaman bangsa Indonesia dalam melaksanakan hukum, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan perkembangan teknologi dan paham-paham atau pemikiran-pemikiran dari budaya asing.

Kondisi budaya hukum tersebut merupakan salah faktor yang mengakibatkan *carut marut*-nya hukum di Indonesia karena budaya hukum merupakan salah satu komponen hukum yang sangat berpengaruh, baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penegakan hukum. Pembentukan hukum dan penegakan hukum merupakan wujud dari pembangunan hukum, maka dapat dikatakan dengan terpuruknya budaya hukum maka akan berdampak negatif pada pembangunan hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, hal-hal yang perlu direkomendasikan/ disarankan sebagai berikut :

1. Perlu merubah merubah model pendidikan tinggi hukum yang selama ini hanya mempelajari undang-undang saja, hal ini perlu pendekatan sosiologis dengan titik berat pada peningkatan budaya hukum (peningkatan moralitas).
2. Perlu ada pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diyakini kebenarannya, sehingga implementasi peraturan perundang-undangan tidak akan menimbulkan penolakan dari masyarakat.

3. Perlu penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
4. Perlu adanya perbaikan pembangunan budaya hukum, yaitu dengan cara memulai membangun budaya hukum melalui dari keluarga sebagai lingkup terkecil, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Peningkatan sosialisasi hukum (baik substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum) guna meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga yang taat pada hukum.
6. Perlu peningkatan keteladanan perilaku aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara) dalam menegakkan hukum, dan juga meningkatkan ketaatan aparat penegak hukum terhadap hukum. Selain itu perlu dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- , *Dari Formal Legalistik ke Delegalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Arief Hidayat, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional*, Bahan Kuliah PDIH KPK Undip-Unila, Sabtu, 30 Januari 2011.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994).

—, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

—, *Posisi Ilmu Hukum Nasional dalam Bangkumnas*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang Angkatan XV, 2009.

—, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Bahan Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang Angkatan XV, 2009.

—, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009.

Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005. Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Foundation, New York, 1975.

—, *American Law: An Introduction*, W. W. Norton & Company, New York, 1984.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008

—, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

-----, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.

-----, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, 2009.

----, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Yahya Muhaimin dan Colin Mac Andrews (ed), *Masalah-Masalah Perkembangan Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1980.

Artikel:

Bagir Manan *Reorientasi Politik Hukum Nasional*, makalah disampaikan pada Diskusi IKAPTISI di UGM, Yogyakarta, 1999.

Bismar Nasution, "Peranan Birokrasi Dalam Mengupayakan Good Governance : Suatu Kajian Dari Pandangan Hukum dan Moral", Disampaikan pada Diseminasi Policy Paper Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Medan, tanggal 1-2 Oktober 2003.

Robiatul Syariah, *Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Bahan Internet:

Anonim, *Korupsi dan Budaya Hukum* dalam <http://antikorupsi.org/indo/content/view/5197/2/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2010.

Anonim, *Masyarakat Indonesia dan Budaya Hukum*, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/15/nas05.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2010

Anonim, *Upaya Penegakan Hukum : Pembentukan Budaya Hukum Atas Keadilan*, dalam file:///C:/Documents%20and%20Settings/ACER%20ONE/My%20Documents/BH%20e.htm diakses tanggal 19 April 2010.

Anonim, *Sambutan Jaksa Agung Hendarman Supandji*, dalam <http://www.ungkap.com/hukrim/164-hendarman-supandji-penting-kembangkan-budaya-hukum.html>, diakses tanggal 10 Mei 2010.

Anonim, *Wawancara BHNTV dengan Menkumham tentang Pembangunan Budaya Hukum* Senin 10 agustus 2009, <http://www.bphntv.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=65>, diakses pada tanggal 19 April 2010.

Dimas Prasidi, *Membaca Arah Reformasi Hukum Pasca Perubahan Kekuasaan Tahun 1998/2004*, dalam <http://dimasprasidi.wordpress.com/2009/04/24/>, *Membaca-arrah-reformasi-hukum-pasca-perubahan-kekuasaan-tahun-1998/2004*, diakses tanggal 19 April 2010.